JALAN MENUJU PERBAIKAN TATA KELOLA HUTAN

Prof. Hariadi Kartodihardjo
26 April 2016

ISI PEMBAHASAN

1. Keterkaitan dan Ketergantungan
2. Apa yang Kita Hadapi?
3. Pembelajaran dan Implikasinya
4. Catatan Penutup

KETERKAITAN DAN KETERGANTUNGAN ANTAR ISU—PROGRAM—KEGIATAN

Keterkaitan & Ketergantungan

- Alokasi resmi/de jure berlomba dng alokasi tdk resmi/ de facto;
- Relasi program & fakta di tapak
- Melampaui pendekatan hukum—kontestasi pengaruh (birokrasi, gerakan sosial, percepatan ekonomi).

EKONOMI, SOSIAL, LINGKUNGAN HIDUP: PERUBAHAN IKLIM—REDD+

↑

INTENSITAS PENGELOLAAN & PEMANFATAN SDA: KK (22 jt, 4,8 non hutan) & HL (31 jt, 7,1 non hutan):

1. Kekosongan pengelolaan
2. Kemandirian pengelolaan
3. Kerjasama
4. Efisiensi Perizinan
5. Biaya dan Tarif

PENINGKATAN KAPASITAS EKONOMI LOKAL (Di semua fungsi hutan—pembangunan desa)

1. Pendidikan dan Kesehatan
2. Infrastruktur Sosial Ekonomi
3. Kewirausahaan
4. Efisiensi & Akses perizinan

PERIZINAN & PENGENDALIAN PEMANFAATAN SDA: (HPT+HP+HPK 76 jt, 27,4 non hutan) & WUP, APL/Kebun

1. Struktur Pasar Hasil Hutan
2. Biaya transaksi perizinan
3. Pengembangan usaha: HA, HT dll
4. Policy thd prsh berkinerja buruk

↑

PENGUATAN INSTRUMEN PERLINDUNGAN P-LH: Kebijakan, Kegiatan

1. Ekonomi LH
2. Perizinan Lingkungan: Wilayah perizinan—quota
3. AMDAL, RPL-RKL
4. Baku Mutu
5. Peraturan & Anggaran
6. Analisis Resiko & Audit LH

PERENCANAAN EKOREGION DAN ANTAR WILAYAH: Skala Nasional

1. RPPLH, KLHS
2. Tata Ruang
3. KPH
4. Penetapan kawasan hutan
5. Inv & solusi klaim kws htn
6. Kinerja DD WIlayah

KAPASITAS LEMBAGA & PENEGAKAN HUKUM: Skala Nasional

1. Penguatan kapasitas
2. Review izin
3. Mediasi
4. Solusi Keterlanjuran

↑

SDM—REFORMASI BIROKRASI—UKURAN KINERJA-POLICY-PROGRAM-MASALAH—LITBANGLATLUH
KOHERENSI PROGRAM UNTUK SUBSYEK/WILAYAH TERTENTU: KPH, KAB, PROP, NASIONAL

APA YANG KITA HADAPI?

DINAMIKA KONDISI TATA KELOLA HUTAN 2012, 2014, 2015

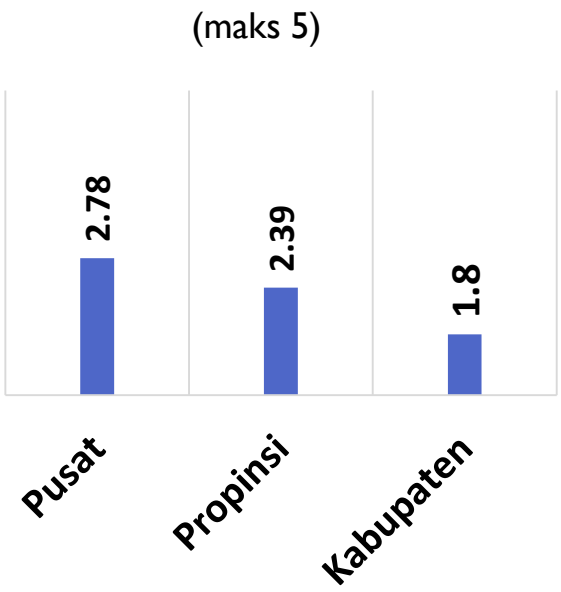

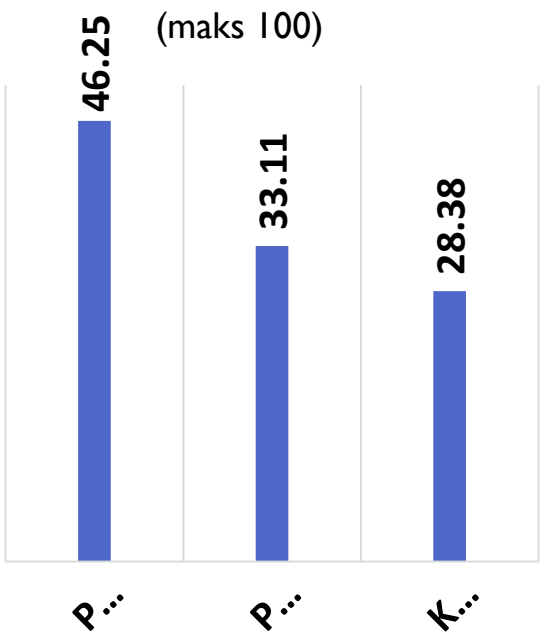

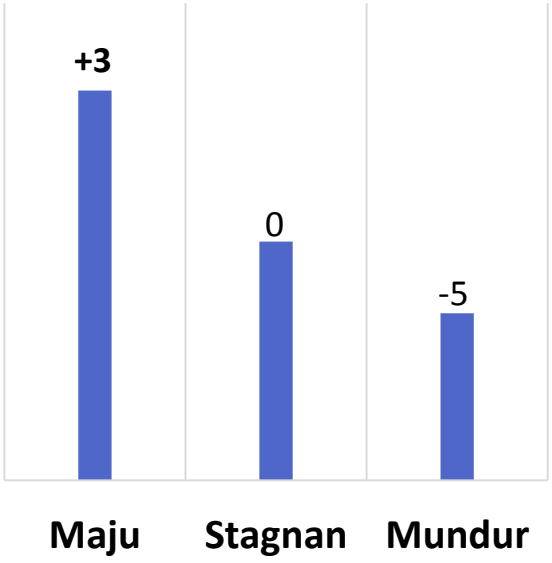

Indeks rata-rata tata kelola hutan, 2012
Keseluruhan 2,33

Indeks rata-rata tata kelola hutan, 2014
Keseluruhan 36

Survei key stakeholders Kondisi Tata Kelola Hutan (n: 35), 2015
Maju (49%)-Stagnan (30%)-Mundur(21%); GN-PSDA -0.5 (skala -1 s.d 1) 13 provinsi.

Sumber: UNDP, 2016; *fortcoming*

Sumber: UNDP, 2016

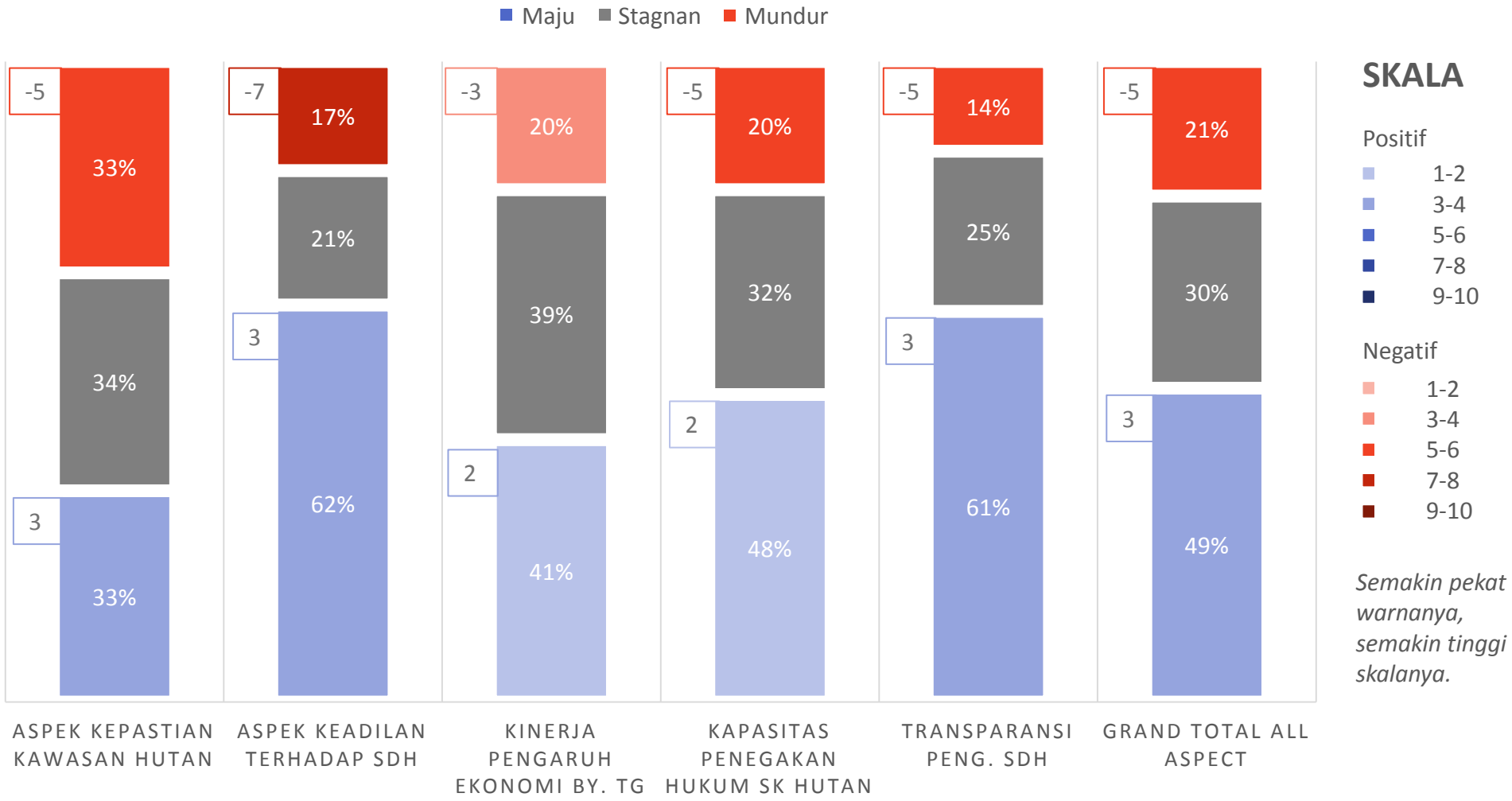

Biaya transaksi 2013 dan 2015

Pelaksanaan Kebijakan Perizinan	2013	2015	Unit Perbaikan
PENGURUSAN IZIN			
Pencadangan kawasan hutan (SK berubah setiap tahun)	Biaya sampai dengan Rp 25 juta untuk mendapat peta dan komitmen izin	Regulasi berubah, makro-mikro dihilangkan. Lokasi izin dalam PIPIB dapat "diurus" dengan membiayai survai lapangan Rp 250 juta	PENATAAN SAAT INI MELALUI KORSUB HUTAN-KEBUN-TAMBANG-ENERGI
Pengurusan izin (P 50/10, 26/12)—rekomendasi Gub/Bup.	Rp 50 ribu sd Rp 100 ribu per Ha.	Regulasi berubah. Biaya tetap: Rp 50 ribu sd Rp 100 ribu per Ha.	
Pelayanan informasi perizinan secara online (P 13/2012); satu pintu di Pemda dan BKPM	Masih terdapat biaya untuk melancarkan proses administrasi	Regulasi berubah: Urus izin Rp 50 juta, di Pemda izin satu pintu belum efektif	

LANJUTAN----PENGURUSAN IZIN

Izin Pemanfaatan Kayu (P 14/11, P 20/13)	Biaya tim teknis lapangan-nego; tarif tergantung luas dan jenis kayu	Regulasi berubah: Tarif Rp 5.000 sd Rp 10.000 per m3	Daerah: Pemda Prov dan Kab
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P 18/2011, P 14/2013)	Tergantung luas, dapat sampai Rp 15 milyar	S.d Rp 10 milyar. Informan dpt info dari pengusaha lain	PENATAAN SAAT INI MELALUI KORSUB HUTAN-KEBUN-TAMBANG
Tukar menukar kawasan hutan (P 32/2010, P 41/2012)	Ada, tidak diketahui secara pasti	Tidak ada informasi	

PERENCANAAN HUTAN

PERENCANAAN HUTAN	2013	2015	Unit Perbaikan
Pengesahan rencana kerja usaha (RKU) (P 56/2009, P 24/11)	Revisi RKU perlu Rp 50 sd Rp 100 juta dan biaya pengesahan sampai Rp 200 juta	Tidak ada informasi	PENATAAN SAAT INI MELALUI KORSUB HUTAN-KEBUN-TAMBANG
Pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) (P 56/2009, 24/11)—menetapkan jatah produksi	Pengesahan dapat sampai Rp 150 juta. Biaya monitoring untuk 140 hr kerja x 8 orang.	Regulasi berubah: Pengesahan dapat sampai Rp 150 juta. Biaya monitoring saat ini dapat dinegosiasikan. Rp 10 juta per tim.	
Penataan batas areal izin (P 19/11, P 43/13)	Tidak ada standar biaya dan waktu kerja. Biaya tambahan sd Rp 300 juta	Regulasi berubah: Biaya tambahan dapat mencapai Rp 380 juta	
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (P 33/2009 jo P 5/2011)	Konsultan Rp 50 ribu per Ha. Pengesahan ada yang mencapai Rp 1 milyar (terkait perpanjangan izin).	IHMB bisa disusun tanpa survai lapangan	

PRODUKSI HASIL HUTAN

PRODUKSI HASIL HUTAN	2013	2015	Unit Perbaikan
Pemasukan dan penggunaan alat (P 53/2009)	Mengurus biaya administrasi dapat sampai Rp 50 jt	Tidak ada, menjadi bagian pengesahan RKT	REGULASI TELAH DIPERBAIKI DAN EVALUASINYA MELALUI KORSUB
Kerjasama operasi dalam hutan tanaman (P 20/05, P 29/12)	Dapat mencapai Rp 100 juta	Tidak ada informasi	
Pemenuhan tenaga teknis (GANIS) kehutanan (P 58/2009).	Biaya pelatihan Rp 30-40 juta per orang	Sertifikat GANIS dpt dinegosiasikan. Di Riau pelatihan GANIS paling murah (Rp 8 juta)	
Izin pembuatan dan penggunaan koridor (P 9/2010)	Izin ini sd Rp 15 juta, lama waktu tidak pasti	Bisa cepat (6 bulan) kalau dikawal. Biaya Rp 5 juta sd Rp 100 juta	

TATA USAHA HASIL HUTAN

TATA USAHA HASIL HUTAN			
Sistem informasi penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan DR-PSDH (P 8/2009)	Tidak pasti; membayar uang bulanan kepada petugas.	Regulasi berubah: uang bulanan (Rp 2,5 per orang). Tarif untuk Petugas LHP Rp 1000 sd Rp 3000 per m3. Penerbit SPP Rp 10.000 per m3.	TERDAPAT RENAKSI PNBP: Dir Pajak, PPATK, BPK-RI, KLHL, KPK
Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (HA, HT) (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13) dan Verifikasi Legalitas Kayu	Konsultan ±500 jt, 50-500 rb/pos (20-30 pos), Monev: 100-150 x SPT dibayar perusahaan	Sertifikasi PHPL maupun VLK tidak mampu menepis pungutan di sungai, laut atau jalan angkutan. Ada kasus, untuk pengamanan laut dari Papua ke Surabaya tarif Rp 50 milyar per tahun.	TIDAK TERDAPAT KORSUB KHUSUS, DIINTEGRASIKAN DENGAN KONSUB HUTAN DAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

KEBIJAKAN LAIN

KEBIJAKAN LAIN	2013	2014	UNIT PERBAIKAIN
Monitoring dan pengawasan rutin	Membayar biaya perjalanan dan akomodasi	Biaya ini antara Rp 400 sd 600 juta per perusahaan per tahun.	TDP RANCANGAN RENAKSI PENINGKATAN INTEGRITAS
Perlindungan hutan (termasuk apabila terjadi konflik sosial)	Rp 20-30 ribu /pasukan; Puluhan juta sumbangan rutin	Rp 20-30 ribu /pasukan; Rp 15 juta sumbangan rutin per bulan	

PEMBELAJARAN PELAKSANAAN GNSDA-KPK DAN IMPLIKASINYA

NKB DAN GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM

2010

- Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan (2010)

2011

- Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara (2011)

2012

- Semiloka Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan (2012)

2013

- Kajian Perizinan Sektor Kehutanan (2013)

- NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan (2013)
- Kajian Sistem Pengelolaan PNBP dan Korsup Minerba (2013)
- Kajian Perizinan Sektor Pertambangan (2013)

2014

- Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor Batubara (2014)
- Kajian Pengelolaan Hutan Jawa Perum Perhutani (2014)
- Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut (2014)
- Refleksi Setahun NKB 12 K/L (2014)

2015

- Deklarasi Penyelamatan SDA (2015)
- NKB 27 K/L Gerakan Nasional Penyelamatan SDA (2015)

- Kajian PNBP Kehutanan (2015)

2016

- AGENDA 24 GUBERNUR, 7 kelompok renaksi (2016-2017)
- AGENDA K/L (PNBP) 6 temuan, 76 output (2016-2017)
- AGENDA PERHUTANI 4 temuan, 111 output (2016-2017)

JADWAL KORSUB 2016

No.	Lokus	Tanggal Pelaksanaan
1.	*Kick off Meeting*	16 Maret
2.	Kalimantan Barat	4 – 8 April
3.	Jambi	11 – 15 April
4.	Sumatera Selatan	25 – 29 April
5.	Kalimantan Tengah	9 – 13 Mei
6.	Papua Barat	23 – 27 Mei
7.	Sulawesi Tengah	30 Mei – 3 Juni
8.	Bengkulu	13 – 17 Juni
9.	Kalimantan Utara	20 – 24 Juni
10.	Riau	1 – 5 Agustus
11.	Papua	8 – 12 Agustus
12.	Kalimantan Timur	29 Agustus – 2 September
13.	Sulawesi Barat	5 – 9 September

PEMBELAJARAN GNSDA—KPK, MENUJU FRAME BARU

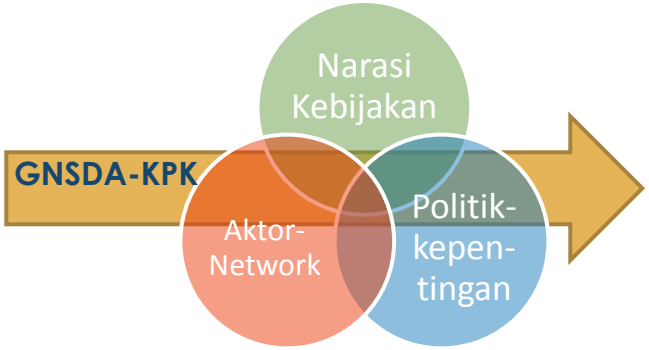

Mampu menerobos "*policy space*"

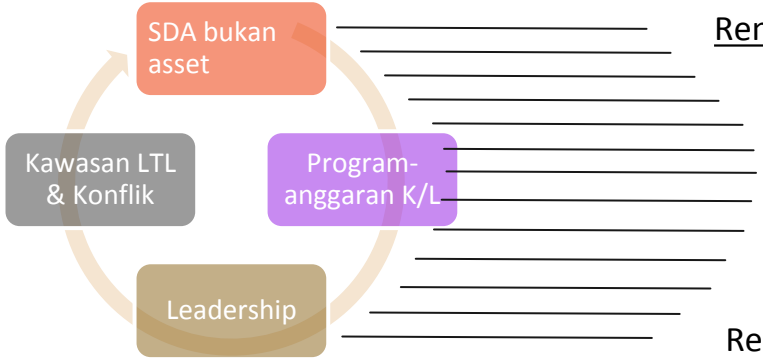

Menghadapi 4 hambatan utama

Renaksi IZIN HUTAN
Renaksi PNBP HUTAN
Renaksi IZIN KEBUN
Renaksi PAJAK KEBUN
Renaksi ASET
Renaksi KONFLIK
Renaksi INTEGRITAS

Agenda K/L

STRATEGI: POLICY—SKEMA HUBUNGAN PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN

PELAKSANAAN RENAKSI SEJAUH INI

KOORDINATIF

1. Mendekatkan capaian kerja dng ukuran administratif (output) vs kebutuhan nyata masyarakat (outcome).
2. Menerobos persoalan koordinasi
3. Proses pembaruan kebijakan dng argumen terbuka bagi publik

TEKNIKAL

1. Memiliki data SDA update sebagai dasar pengambilan keputusan;
2. Penguatan K/L dan Pemda—tupoksi, substansi program dan kegiatan, cara pengukuran kinerja (tidak menghargai/menyalahkan inovasi);
3. Menuju pengendalian kerugian negara akibat kelemahan pengelolaan SDA.

CATATAN AKHIR

- SEDANG DITETAPKAN PRIORITAS OUTCOME DAN RENAKSI OPERASIONAL BAGI SETIAP PROPINSI SEBAGAI TARGET BERSAMA
- PELAKSANAAN PERBAIKAN DAN IDENTIFIKASI BARU PERBAIKAN REGULASI NASIONAL
- PENETAPAN SUBSTANSI PENCEGAHAN KORUPSI SECARA OPERASIONAL (AKUNTABILITAS PROSES, KETERBUKAAN INFORMASI, DLL)
- KOORDINASI LEBIH ERAT K/L DAN PEMDA UNTUK MEWUJUDKAN OUTCOME DENGAN SUPERVISI GNSDA/KORSUB KPK.

TERIMAKASIH